

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Moralitas Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pada Inspektorat Kota Bandung

Sarah Affifah Aprilianty^{1*}, Kartika Berliani²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia Membangun

*Corresponding Author e-mail: sarahaprilianty@student.inaba.ac.id¹

Email: kartika.berliani@inaba.ac.id²

Abstract: *The rapid development of accounting today not only provides a positive contribution in increasing the transparency and accountability of financial reports, but also creates new risks, one of which is the increased potential for fraud. Recognizing the importance of this issue, this study was conducted to examine the factors that influence fraud prevention. Using quantitative research with descriptive and verification approaches. The data were collected through library research, field research, interviews & questionnaires to 64 respondents who were all auditors of the Bandung City Inspectorate. The sampling technique used a non-probability sampling technique with a total sampling approach, meaning the entire research population was sampled. Data analysis was carried out with the help of SPSS version 26 through a series of tests, including validity, reliability, classical assumptions, and hypothesis testing. The results show that SPIP and HR Competence have a significant impact on fraud prevention, in contrast to Morality which has no significant effect. The R-Square value obtained was 0.906 or 90.6%, which means that the independent variables play a dominant role in influencing fraud prevention, although the remaining 9.4% is influenced by external factors outside the scope of this study.*

Keywords: *Government Internal Control System, Human Resources Competence, Morality, Fraud Prevention*

Abstrack: Semakin pesatnya perkembangan di bidang akuntansi pada saat ini tidak hanya memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan saja, tetapi juga menimbulkan risiko baru, salah satunya adalah meningkatnya potensi terjadinya kecurangan. Menyadari pentingnya isu tersebut, studi ini dilakukan guna mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan kecurangan. Menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan deskriptif dan verifikatif. Data tersebut dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, wawancara & kuesioner kepada 64 responden yang seluruhnya merupakan auditor Inspektorat Kota Bandung. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *non-probability* sampling dengan pendekatan total sampling yang berarti seluruh populasi penelitian dijadikan sampel. Analisis data dilakukan dengan bantuan SPSS versi 26 melalui serangkaian uji, termasuk uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, serta pengujian hipotesis. Hasilnya menunjukkan bahwa SPIP dan Kompetensi SDM mempunyai dampak signifikan terhadap pencegahan kecurangan, berbeda dengan Moralitas yang tidak berpengaruh secara signifikan. Nilai R-Square ini diperoleh sebesar 0,906 atau 90,6%, yang berarti variabel-variabel independen berperan secara dominan dalam memengaruhi pencegahan kecurangan, meskipun 9,4% sisanya dipengaruhi faktor eksternal diluar cakupan studi ini.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Moralitas, Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Pendahuluan

Semakin pesatnya perkembangan di bidang akuntansi pada saat ini tidak hanya memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan saja, tetapi juga menimbulkan risiko baru, salah satunya adalah meningkatnya potensi terjadinya kecurangan (*fraud*). Didalam akuntansi, terdapat dua jenis kesalahan, yakni kekeliruan (*error*) yang dilakukan secara tidak sengaja dan kecurangan (*fraud*) yang umumnya memang dilakukan secara sengaja (Faradiza, 2019).

Selain di sektor swasta, praktik kecurangan akuntansi juga banyak terjadi di sektor pemerintahan (Dewi, 2016). Pembukuan, pengelolaan inventaris, dan pelaporan merupakan komponen integral dari Pengelolaan Barang Milik Negara yang memiliki pengaruh besar pada keakuratan dan peningkatan laporan keuangan (Aulia & Syarif,



2024). Hasil audit yang dilakukan dapat menunjukkan seberapa baik kualitas laporan keuangan (Oktaviani & Syarif, 2024). Hal ini yang menyebabkan opini WDP diberikan BPK. Opini tersebut biasanya muncul karena adanya salah saji material yang tidak dapat diperiksa secara memadai, seperti aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya, yang membuka peluang terjadinya kecurangan (*fraud*).

Merujuk pada hasil yang diperoleh Pemerintah Kota Bandung (Pemkot) tahun 2023 mendapatkan opini WDP dari BPK, dikarenakan ada sejumlah temuan didalam laporan tersebut. Seperti yang tercantum di dalam CaLK, Pemerintah Kota Bandung menyajikan saldo Aset Tetap sebesar Rp49,72 triliun. Berdasarkan nilai tersebut, hasil sensus tahun 2023, sebesar Rp551,72 miliar diantaranya belum dapat dipastikan keberadaannya oleh para Pengurus Barang. Dari saldo Aset Tetap Tanah sebesar Rp42,5 triliun, diantaranya terdapat sebanyak 1.141 bidang tanah yang disewakan, luasnya pun lebih besar daripada luas tanah yang tercatat pada Daftar Barang Milik Daerah, dengan selisih sebesar 139.465m² dan NJOP sebesar Rp1,80 triliun, yang belum dapat dijelaskan selisihnya. Selain itu, Neraca per 31 Desember 2023 masih mencatat aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada 14 perumahan yang sudah beralih fungsi dan tidak dikuasai Pemerintah Daerah sebesar Rp187,99 miliar serta belum menyajikan aset PSU pada 95 perumahan sebesar Rp4,01 triliun telah diserahkan kepada Pemkot Bandung. Karena tidak tersedianya data dan informasi dari satuan kerja terkait, bukti yang cukup dan tepat tentang nilai-nilai tersebut tidak dapat diperoleh BPK. Maka dari itu, hingga saat ini BPK belum bisa menilai apakah angka tersebut perlu disesuaikan. <https://www.bandung.go.id> (15 Agustus 2024)

Dalam opini BPK tersebut mengindikasikan adanya kelemahan pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang membuka peluang terjadinya *fraud* (kecurangan), baik dalam bentuk penyalahgunaan aset, manipulasi laporan keuangan, maupun ketidaksesuaian administratif. BPK pun tidak dapat memperoleh bukti yang cukup untuk memastikan kebenaran nilai aset tersebut. Kondisi ini membuka peluang terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Merujuk pemaparan Tarjo & Eklamsia Sakti (2022:23), pencegahan kecurangan yaitu “upaya menekan peluang dan menghilangkan keinginan untuk melakukan *fraud*, sistem pencegahan *fraud* dapat membantu memastikan stabilitas serta kelangsungan bisnis dengan meningkatkan pengendalian internal, pelatihan kesadaran risiko *fraud*, dan mekanisme pelaporan yang efektif.” Didalam lingkungan pemerintah daerah, Inspektorat Daerah berperan sebagai aparat pengawasan intern yang memiliki tanggung jawab penting guna pencegahan dan penanganan kecurangan melalui pengawasan, evaluasi, serta tindak lanjut terhadap potensi penyimpangan.

Dalam konteks ini, *fraud* bukan hanya disebabkan oleh niat individu semata, tetapi juga oleh lemahnya sistem dan lingkungan pengendalian di dalam organisasi pemerintah. Menurut Mahmudi (2019:251), SPIP yaitu “sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.” Tingginya tingkat kepatuhan pegawai terhadap SPI yang diterapkan instansi pemerintah, maka akan semakin kecil kemungkinannya terjadi tindak kecurangan dalam sektor pemerintahan (Rokhim & Jaya, 2021). Hal ini memperkuat hasil studi yang dilakukan Pratama *et al.* (2024), bahwa SPIP berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Sementara itu, hal tersebut tidak sejalan dengan hasil studi yang dilakukan Ayem & Kusumasari (2020), bahwa SPIP tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

SDM yang kompeten di bidangnya sangat dibutuhkan agar pengelolaan keuangan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dengan merekrut pegawai yang memiliki latar belakang bidang yang sesuai (Raharja & Berliani, 2025). Menurut Sudarmanto (2019:49), kompetensi SDM yaitu “keterampilan dan karakteristik seorang

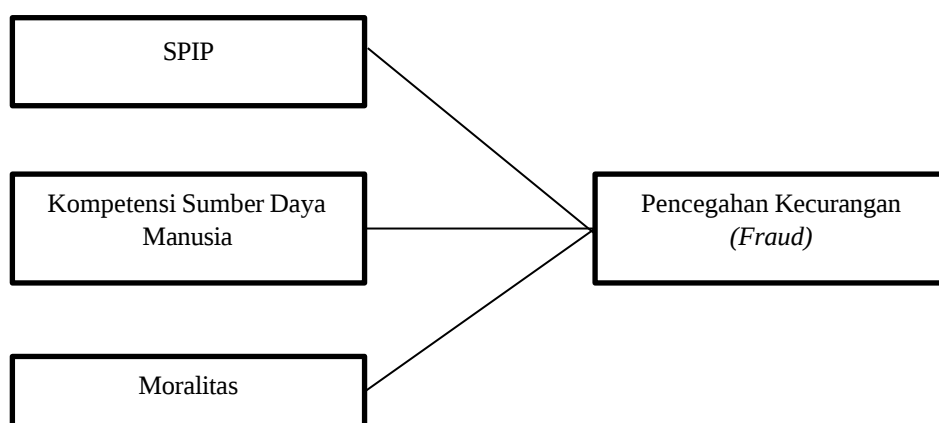
pegawai negeri, yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas jabatannya agar pegawai negeri tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.” Peningkatan kinerja menjadi keharusan bagi pemerintah guna memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas (Sunjaeni & Berliani, 2024). Temuan studi oleh Puspitanisa & Purnamasari (2021) sejalan dengan penjelasan tersebut, yang membuktikan jika kompetensi SDM mempunyai pengaruh positif signifikan pada upaya pencegahan tindak kecurangan. Berlawanan dengan hasil studi yang telah dilaksanakan oleh Nur’aini & Arismutia (2024), mengungkapkan kompetensi SDM tidak mempengaruhi dalam upaya pencegahan kecurangn.

Faktor penting lainnya yang memengaruhi pencegahan kecurangan yaitu faktor moralitas (Chairi & Darwanis, 2022). Moralitas menurut Zunaidi (2022:59) mengemukakan bahwa “moralitas merupakan prinsip-prinsip tentang bagaimana menciptakan dan memelihara hubungan sosial yang benar dan saling menghormati berbagai isu kepentingan yang sangat penting bagi sesama dan hukum dinyatakan dapat diterima secara moral hanya jika hukum tersebut konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip moral tersebut” Kesadaran moralitas yang tinggi pada individu biasanya akan menjauh dari perilaku menyimpang, karena berpegang pada prinsip moral yang bersifat universal (Yilmaz dkk., 2019). Hasil studi Chairi (2022) mengungkapkan moralitas memiliki pengaruh positif secara nyata dalam upaya pencegahan kecurangan. Namun pada studi yang dilakukan oleh Fitri & Nanda (2024), mengungkapkan moralitas individu tidak mempengaruhi terhadap pencegahan kecurangan.

Adapun tujuan dari penelitian ini, yakni guna mengumpulkan, mengolah, dan menelaah data yang berkaitan dengan SPIP, Kompetensi SDM, dan Moralitas secara parsial dan simultan.

Guna memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai arah studi ini, maka model penelitian digambarkan seperti dibawah ini:

Gambar 1. Model Penelitian



Merujuk pada model penelitian dan permasalahan yang usai diidentifikasi sebelumnya, di bawah ini hipotesis dalam studi yang telah dirumuskan oleh peneliti:

- H0 : Tidak memiliki pengaruh dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*).
- H1 : Memiliki pengaruh dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*).
- H0 : Tidak memiliki pengaruh dari Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*).
- H2 : Memiliki pengaruh dari Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*).

- H0 : Tidak memiliki pengaruh dari Moralitas terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*).
- H3 : Memiliki pengaruh dari Moralitas terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*).
- H0 : Tidak memiliki pengaruh dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Moralitas terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*).
- H4 : Memiliki pengaruh dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Moralitas terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) secara simultan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dikemukakan oleh Sugiyono (2020:2), yaitu “cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.” Metode kuantitatif dipilih peneliti pada analisis ini, dengan menggabungkan pendekatan analisis deskriptif dan verifikatif.

Metode *non-probability sampling* dengan pendekatan sampling total digunakan peneliti guna pengambilan sampel. Adapun pengertian *non-probability* sampel menurut (Sugiyono (2020:131), yakni “teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang ataupun kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.” Sedangkan sampling total berdasar pendapat Sugiyono (2020:133), yakni “teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.” Penulis memutuskan untuk menggunakan seluruh anggota populasi yaitu 64 individu dari Inspektorat Daerah Kota Bandung.

Tabel 1. Operasional Variabel

Faktor Penelitian	Definisi Teoritis	Indikator	Nomor Pertanyaan	Skala
Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) (Y)	Karyono (2016:48) “pencegahan <i>fraud</i> adalah upaya untuk menagkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, serta mengidentifikasi kegiatan yang berisiko tinggi terjadinya kecurangan (<i>fraud</i>).”	1. Kebijakan 2. Prosedur 3. Pelatihan 4. Komunikasi	1-2 3-4 5-6 7-8	Ordinal
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (X1)	Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yaitu “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”	1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi & Komunikasi 5. Pemantauan	1-2 3-4 5-6 7-8 9-10	Ordinal
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)	Menurut Sudarmanto (2019:49) Kompetensi SDM yakni “keterampilan dan karakteristik seorang pegawai negeri, yaitu berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas jabatannya agar pegawai negeri tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.”	1. Pengetahuan (<i>Knowledge</i>) 2. Keterampilan (<i>Skill</i>) 3. Sikap (<i>Attitude</i>)	1-2 3-4 5-6	Ordinal

Moralitas	Zunaidi (2022:59) mengemukakan bahwa “moralitas merupakan prinsip-prinsip tentang bagaimana menciptakan dan memelihara hubungan sosial yang benar dan saling menghormati berbagai isu kepentingan yang sangat penting bagi sesama dan hukum dinyatakan dapat diterima secara moral hanya jika hukum tersebut konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip moral tersebut”	1. Orientasi Hukuman & Kepatuhan 2. Orientasi Relativis Instrumental 3. Orientasi Kesepakatan antar pribadi 4. Orientasi Hukum antar Ketertiban 5. Orientasi prinsip Etika Universal	1-2 3-4 5-6	Ordinal
-----------	--	--	-------------------	---------

Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pendapat Sugiyono (2020:291), studi literatur yaitu “berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiahnya.” Peneliti mengumpulkan data dalam studi ini melalui buku, skripsi, jurnal, internet, dan media lainnya untuk mencari informasi tambahan yang berkaitan dengan judul penelitian.

Guna memperoleh hasil penelitian yang sesuai harapan, maka penulis mengumpulkan data dan informasi pendukung melalui penelitian lapangan menggunakan penyebaran kuesioner kepada responden serta melakukan sesi wawancara secara langsung di Kantor Inspektorat Daerah Kota Bandung. Keuesioner menurut Sugiyono (2020:199) yakni “teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.” Didalamnya mengandung sejumlah pertanyaan yang relevan serta sesuai dengan fokus penelitian, sehingga mampu menggali informasi yang dibutuhkan secara efektif dan sistematis. Sedangkan wawancara menurut Sugiyono (2020:114), sebagai “pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.” Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur didalam penelitian ini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2020:116), “wawancara tidak terstruktur merupakan bentuk wawancara bebas, di mana peneliti hanya menggunakan pedoman yang berisi garis-garis besar dari topik yang akan dibahas.”

Hasil dan Pembahasan

Uji Validitas

Pengujian validitas ini dilakukan guna mengetahui apakah alat ukur mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat dan memiliki kesesuaian dengan teori yang digunakan.

Table 2. Uji Validitas

Case Processing Summary			
Cases		N	%
	Valid	64	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	64	100,0

Dari 64 data yang dianalisis pada studi ini, seluruh data variabel X₁, X₂, X₃, dan Y berhasil dikumpulkan secara lengkap tanpa adanya data yang hilang, sehingga persentase keberhasilan mencapai 100%. Hal ini memastikan validitas dan kelengkapan data untuk analisis selanjutnya. Asumsi yang digunakan dalam pengujian validitas instrumen yaitu jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dinyatakan valid, namun jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ dinyatakan tidak valid.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) (Y)

Variabel	Item	r_{hitung}	$r_{tabel} (N=64)$	Keterangan
Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) (Y)	Y1	0,762	0,242	Valid
	Y2	0,798	0,242	Valid
	Y3	0,825	0,242	Valid
	Y4	0,696	0,242	Valid
	Y5	0,832	0,242	Valid
	Y6	0,749	0,242	Valid
	Y7	0,796	0,242	Valid
	Y8	0,767	0,242	Valid
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (X1)	X _{1.1}	0,745	0,242	Valid
	X _{1.2}	0,845	0,242	Valid
	X _{1.3}	0,835	0,242	Valid
	X _{1.4}	0,856	0,242	Valid
	X _{1.5}	0,909	0,242	Valid
	X _{1.6}	0,794	0,242	Valid
	X _{1.7}	0,871	0,242	Valid
	X _{1.8}	0,830	0,242	Valid
	X _{1.9}	0,787	0,242	Valid
	X _{1.10}	0,779	0,242	Valid
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)	X _{2.1}	0,783	0,242	Valid
	X _{2.2}	0,841	0,242	Valid
	X _{2.3}	0,880	0,242	Valid
	X _{2.4}	0,806	0,242	Valid
	X _{2.5}	0,864	0,242	Valid
	X _{2.6}	0,833	0,242	Valid
Moralitas (X3)	X _{3.1}	0,840	0,242	Valid
	X _{3.2}	0,879	0,242	Valid
	X _{3.3}	0,869	0,242	Valid

X _{3,4}	0,853	0,242	Valid
X _{3,5}	0,851	0,242	Valid
X _{3,6}	0,856	0,242	Valid

Hasil evaluasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa seluruh komponen dalam variabel dinyatakan sesuai, karena setiap item pertanyaan memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Maka dari itu, dapat diartikan semua instrumen yang dipergunakan telah valid serta layak.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini digunakan untuk mengukur konsistensi kuesioner yang merupakan indikator dan variabel yang telah melalui uji validitas dan dinyatakan valid. Dengan asumsi jika *cronbach alpha* lebih besar dari kriteria (0,60) dinyatakan reliabel, namun jika *cronbach alpha* lebih kecil dari kriteria (0,60) maka dapat dinyatakan tidak reliabel.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (X1)	0,947	Reliable
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)	0,913	Reliable
Moralitas (X3)	0,927	Reliable
Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) (Y)	0,907	Reliable

Seluruh variabel dalam studi di atas lolos dalam uji reliabilitas dengan memperoleh koefisien Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,600, sehingga menunjukkan konsistensi yang tinggi.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:161) “uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.” Apabila *Asymp.Sig* > 0.05 maka distribusi normal, namun jika *Asymp.Sig* < 0.05 maka tidak berdistribusi secara normal.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorof-Smirnov Test

N		Unstandardized Residual 64
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,92998182
	Absolute	,111
Most Extreme Differences	Positive	,067
	Negative	-,111
Test Statistic		,111
Asymp. Sig. (2-tailed)		,050 ^c

Uji tersebut memperoleh nilai Asymp.Sig sebesar 0,050, yang sama dengan tingkat signifikansi yaitu 0,05. Dapat ditarik kesimpulan dari hasil analisis di atas yaitu data studi berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018:107) “uji multikolinearitas ini bertujuan guna menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.”

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

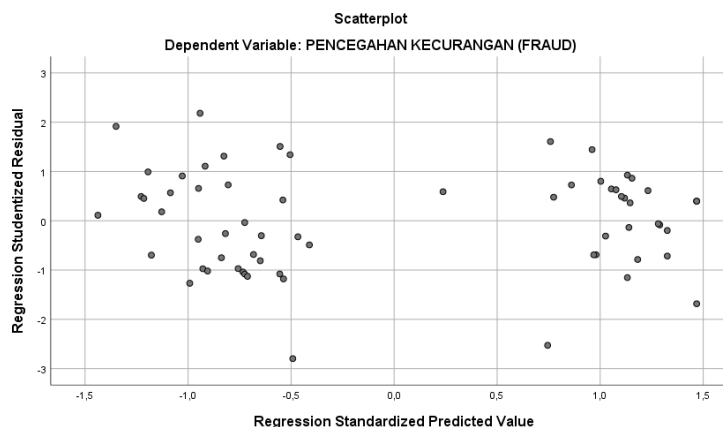
		Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,016	1,294		,785	,435		
	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	,300	,093	,388	3,231	,002	,108	9,220
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	,519	,126	,384	4,120	,000	,180	5,562
	Moralitas	,255	,131	,213	1,954	,055	,132	7,601

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Analisis pada studi tersebut menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen memiliki skor toleransi diatas 0,100 serta VIF di bawah 10. Maka hal tersebut dapat menunjukkan jika studi ini tidak mengalami gejala multikolinearitas diantara seluruh variabel yang digunakan dalam model tersebut.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Merujuk pada ilustrasi yang ditampilkan dalam hasil uji heteroskedastisitas diatas menggunakan scatterplot memperlihatkan jika tidak tampak pola tertentu dengan sejumlah titik residual tersebar secara acak disekitar garis nol, yang berarti tidak adanya heteroskedastisitas.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 7. Hasil Uji Parsial

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,016	1,294		,785	,435
	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	,300	,093	,388	3,231	,002
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	,519	,126	,384	4,120	,000
	Moralitas	,255	,131	,213	1,954	,055

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Dari yang tersaji dalam tabel, memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

H1: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*), dengan nilai $t_{hitung} 3,231 > t_{tabel} 2.000$ dan skor sig $0,002 < 0,05$.

Temuan dalam studi selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama *et al.* (2024), yakni SPIP berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Namun, berlawanan dengan hasil studi yang diperoleh Ayem & Kusumasari (2020), mengungkapkan SPIP tidak mempengaruhi terhadap pencegahan *fraud*. Dengan SPIP yang diterapkan semakin kuat dan efektif, akan kian besar juga kemampuannya dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Efektivitas SPIP ini akan menjadi kunci dalam membangun sistem birokrasi yang professional, bersih, dan bebas dari praktik kecurangan. Maka dari itu, penguatan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) seharusnya menjadi prioritas utama guna mengoptimalkan tata kelola pemerintah yang efektif.

H2: Kompetensi Sumber Daya Manusia juga berpengaruh positif terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*), dengan nilai $t_{hitung} 4,120 > t_{tabel} 2.000$ dan skor sig $0,000 < 0,05$.

Temuan studi selaras dengan studi yang diperoleh Puspitanisa & Purnamasari (2021) membuktikan jika kompetensi SDM mempunyai pengaruh positif signifikan pada upaya pencegahan tindak kecurangan. Berlawanan dengan hasil studi yang telah dilaksanakan oleh Nur'aini & Arismutia (2024), mengungkapkan kompetensi SDM tidak mempengaruhi dalam upaya pencegahan kecurangan. Peningkatan pemahaman sumber daya manusia mengenai dampak dan konsekuensi dari tindakan kecurangan berpotensi untuk menumbuhkan kesadaran moral dan professional dalam bekerja, yang akhirnya dapat berkontribusi dalam mencegah terjadinya pelanggaran/kecurangan. Dengan kata lain kompetensi SDM tidak hanya mencakup keahlian teknis, tetapi juga pemahaman terhadap nilai-nilai etika dan kepatuhan. Dengan merekrut pegawai yang memiliki latar belakang akuntansi yang sesuai SDM yang kompeten dibidangnya sangat dibutuhkan agar pengelolaan keuangan dapat menghasilkan laporan keuangan berkualitas (Raharja & Berliani, 2025).

H3: Moralitas pada penelitian ini tidak berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*), karena nilai $t_{hitung} 1,954 < 2.000$ dan skor sig $0,55 > 0,05$.

Temuan tersebut memperkuat hasil studi yang telah ditulis Fitri & Nanda (2024), mengungkapkan moralitas individu tidak mempengaruhi terhadap pencegahan kecurangan. Sebaliknya, hasil studi bertentangan dengan Chairi (2022) yang mengungkapkan moralitas memiliki pengaruh positif secara nyata terhadap pencegahan kecurangan. Perbedaan hasil studi menunjukkan bahwa pengaruh moralitas terhadap pencegahan kecurangan sangat bergantung pada konteks organisasi dan lingkungan sosial tempat individu bekerja. Oleh karena itu moralitas saja tidak cukup untuk mencegah kecurangan. Diperlukan dukungan sistem, budaya, dan kebijakan organisasi agar upaya pencegahan berjalan dengan efektif.

Uji Simultan (Uji f)

Tabel 8. Hasil Uji Simultan

		Anova ^a				
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2270,945	3	756,982	193,548	,000 ^b
	Residual	234,664	60	3,911		
	Total	2505,609	63			

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

b. Predictors: (Constant), Moralitas, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel yang diteliti memiliki peran dalam upaya teradinya pencegahan kecurangan. Hal tersebut terlihat dari nilai berdasarkan tabel yakni $F_{hitung} 193,548 > F_{tabel} 2,758$ dan nilai $0,000 < 0,05$. Hasil studi secara keseluruhan variabel bebas dapat menunjukkan pengaruh yang jelas pada variabel dependen.

Analisis Koefisien Determinasi

Tabel 9. Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,952 ^a	,906	,902	1,978

a. Predictors: (Constant), Moralitas, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Merujuk pada tabel yang tertera di atas, R Square yaitu 0,906 atau 90,6%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen yang digunakan dalam model tersebut memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dan komponen lain yang berada di luar variabel penelitian didalam riset tersebut memberikan kontribusi sebesar 9,4%.

Kesimpulan

Merujuk pada data dan hasil kajian yang didapat, dapat disimpulkan secara parsial SPIP menunjukkan pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Temuan tersebut menunjukkan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) secara efektif mampu membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mengendalikan, dan meminimalkan resiko terjadinya kecurangan. Kompetensi SDM memberikan dampak positif secara parsial terhadap upaya pencegahan kecurangan. Dengan kata lain, jika kompetensi karyawan yang dimiliki semakin tinggi, akan semakin besar pula kemampuannya dalam mendeteksi dan mencegah potensi kecurangan di dalam

organisasi. Moralitas secara parsial tidak memengaruhi terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Dikarenakan moralitas saja belum cukup efektif dalam menegah kecurangan tanpa disukung oleh sistem, budaya, dan pengawasan yang efektif.

Rekomendasi

Mengingat berpengaruhnya SPIP terhadap pencegahan kecurangan, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan implementasi SPIP secara berkelanjutan agar mampu mencegah terjadinya tindak kecurangan secara lebih efektif. Pelatihan kompetensi SDM juga diperlukan guna meningkatkan keahlian teknis, pemahaman etika aparatur, terutama pada pengelolaan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan. Selain moralitas, pencegahan kecurangan bergantung pada sistem pengawasan yang efektif, budaya kerja yang positif, serta kebijakan yang tegas dan konsisten. Adapun untuk studi selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain, seperti budaya organisasi, tekanan pekerjaan, serta memperluas objek penelitian untuk memperoleh generalisasi hasil yang lebih luas.

Referensi

- ACFE. (2024). Report To The Nation On Occupational Fraud. USA: Global Headquarters.
- Aditia, D. (2019). Audit Sektor Publik. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Arif, M. 1. (2018). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Aulia, E. A., & Syarif, D. (2024). The influence of state-owned property management, the implementation of the State-Owned Property Management Accounting Information System and human resource competency on the quality of government financial reports. *eCo-Buss*, 6(3), 1520-1534. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i3.1247>
- Ayem, S., & Kusumasari, K. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 160-169. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25827>
- Chairi, N., Indriani, M., & Darwanis, D. (2022). Kompetensi, Moralitas Dan Sistem Whistleblowing Dalam Pencegahan Fraud: Studi Empiris Pada Organisasi Pemerintahan Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 22(1), 119-142. <https://doi.org/10.25105/mraai.v22i1.12655>
- Dewi, G. A. K. R. S. (2016). Pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal pada kecurangan akuntansi (Studi eksperimen pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali). *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 1(1). <https://doi.org/10.23887/jia.v1i1.9984>
- Faradiza, S. A. (2019). *Fraud* Pentagon Dan Kecurangan Laporan Keuangan. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.1.1060>
- Fitri, A., & Nanda, N. S. (2024). Pengaruh Pengendalian Internal, Audit Internal, Moralitas Individu Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris Pada Inspektorat Kabupaten Kampar). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 7(2), 275-281. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v7i2.1818>
- Karyono. (2016). Forensic Fraud. Yogyakarta: CV. Andi
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Erlangga.
- Nur'aini, L., & Arismutia, S. A. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Whistleblowing System, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

- Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Pada Inspektorat Daerah Kota Bandung). *eCo-Buss*, 6 (3), 1458-1470. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i3.1200>
- Oktaviani, M. D., & Syarif, D. (2024). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Geologi Mineral dan Batubara Kota Bandung. *Economic Reviews Journal*, 3 (2), 1470-1487. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i2.481>
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal
- Pratama, G. A., Rahmani, N. A. B., & Kusmilawaty, K. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Kasus Fraud/Kecurangan Akuntansi Dengan Pendekatan Fraud Hexagon (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara). *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2(1), 49-68.
- Puspitanisa, W., & Purnamasari, P. (2021). Pengaruh whistleblowing system dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan fraud. *Jurnal Riset Akuntansi*, 42-46. <https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.188>
- Raharja, M. I., & Berliani, K. (2025). The Quality of Government Financial Reports: Factor's That Can Affect It. *eCo-Fin*, 7(1), 321-333. <https://doi.org/10.32877/ef.v7i1.2049>
- Sudarmanto, E., dkk. (2021). Sistem Pengendalian Internal. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Sunjaeni, M., & Berliani, K. (2024). The Influence of the Government's Internal Control System, Good Governance, and Organizational Commitment on Managerial Performance (In Baleendah District, Bandung Regency). *JUDICIOUS*, 5(1), 97–110. <https://doi.org/10.37010/jdc.v5i1.1625>
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W (2021), Metodologi Penelitian, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Tarjo dan Eklamsia Sakti. (2022). Fraud Risk Management Sebuah Referensi Riset dan Praktik. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Yilmaz, O., Bahçekapili, H. G., & Sevi, B. (2019). Theory of moral development. In *Encyclopedia of evolutionary psychological science* (pp. 1-5). Springer, Cham.